



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERHUBUNGAN

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2019



Alamat : Jln. Jenderal Sudirman Sago - Painan
Phone : (0756)7464239
Fax : (0756)7464239
E-mail : dinasperhubungan@pesisirselatankab.go.id
Web : <http://dishub.pesisirselatankab.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

Laporan Kinerja Tahun 2019 ini disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai dan berisi mengenai keberhasilan/kegagalan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut guna mewujudkan tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi. Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* dan juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Dalam kesempatan ini tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terselesainya penyusunan Laporan Kinerja ini. Kami pun menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya masukan dan saran perbaikan dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaannya di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan ini disusun semoga membawa manfaat positif bagi semua pihak dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan di tahun mendatang.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	1
1.2 Sumber Daya Manusia (SDM)	6
1.3 Sarana dan Prasarana	7
1.4 Isu Strategis dan Permasalahan Utama (Strategic Issued) Yang Sedang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	8
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	10
2.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	10
2.3 Perjanjian Kinerja	12
2.4 Rencana Anggaran	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	20

3.2 Realisasi Anggaran	26
------------------------------	----

BAB IV. PENUTUP	31
------------------------------	-----------

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah perlu adanya sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat dan terukur sehingga dapat terlihat progres kerja dari pelaksanaan pemerintahan. Perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dikenal dengan istilah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Peraturan perundangan yang mengatur tentang akuntabilitas adalah Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sedangkan sarana/ alat untuk melaporkan perwujudan pertanggungjawaban tersebut dikenal dengan istilah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (sesuai PermenPAN dan RB nomor : 53 tahun 2014) yang didalamnya terdapat informasi mengenai tingkat keberhasilan maupun kegagalan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta visi misi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dan untuk mengetahui sejauh mana hasil akhir (evaluasi) kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019. Laporan ini berisi ikhtisar realisasi pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen Renstra serta pencapaian Indikator Kinerja Utama.

Tujuan pembangunan bidang perhubungan yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan sebagaimana tersebut dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan 2016 - 2021 adalah :

“Meningkatnya Keselamatan Transportasi”

dengan Indikator “Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan Pertahun”. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal.

Indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi”

2. Meningkatnya Kesadaran Tertib Berlalu Lintas.

Indikator “Persentase Menurunnya Pelanggaran Berlalu Lintas”.

Dari sasaran tersebut dijabarkan dalam 9 (sembilan) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan. Hasil evaluasi dan analisis kinerja sasaran kegiatan berdasarkan indikator kinerja termasuk dalam nilai **sangat tinggi** karena keberhasilan realisasi fisiknya mencapai 99,42%. Sedangkan dari sisi anggaran realisasi penyerapan sampai dengan akhir tahun adalah sebesar **Rp.13.105.073.067,-** (Tiga Belas Milyar Seratus Lima Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah) atau 98.05% dari jumlah anggaran sebesar **Rp.13.365.311.960,-** (Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah). Meskipun hasil evaluasi dan analisis kinerja termasuk dalam kategori berhasil tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa kendala/ permasalahan. Namun demikian dengan segala kemampuan yang dimiliki dinas baik itu sumber daya manusia, sumber daya peralatan maupun sumber daya modal/ keuangan, semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan di tahun 2019 dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan target yang direncanakan.

10 Februari 2020
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



CUKA WAN, S.Sos, M.Si
Kabid. Jitama Muda – IV/c
NIP. 19700204 199101 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan, menyatakan bahwa tugas Pokok Dinas Perhubungan adalah ***“Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten”***. Sedangkan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain adalah :

- a. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang perhubungan Kabupaten; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh:

1. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh :
 - a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
 - a) Kepala Seksi Lalu Lintas

- b) Kepala Seksi Angkutan
 - c) Kepala Seksi Pengujian Sarana
3. Bidang Pengembangan dan Keselamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
- a) Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan
 - b) Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan
 - c) Kepala Seksi Keselamatan
4. Bidang Prasarana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh :
- a) Kepala Seksi Perencanaan Prasarana
 - b) Kepala Seksi Pembangunan Prasarana
 - c) Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana
5. Kelompok Jabatan Fungsional Umum

Susunan organisasi tersebut diatas apabila digambarkan dalam bentuk struktur organisasi akan tampak sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KETERANGAN:
Eselon II.B = 1
Eselon III.A = 1
Eselon III.B = 3
Eselon IV.A = 11

KEPALA DINAS (II.B)
GUNAWAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19700204 199101 1 002

SEKRETARIS (III.A)
TAMRIN S.Sos, MM
NIP. 19650611 199003 1 005

KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN (IV.A)
VERAWATI, S.Sos
NIP. 19760605 200801 2 029

KASUBBAG PERENCANAAN KEUANGAN DAN PELAPORAN (IV.A)
ELZA NILAWATI, SE
NIP. 19831227 200902 2 005

JABATAN FUNGSIONAL

KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN (III.B)
FADLI AMRA, SH, MM
NIP. 19761006 199403 1 001

KEPALA BIDANG PRASARANA (III.B)
MARZAN, SH, MM
NIP. 19700316 198903 1 001

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN (III.B)
DEDY MIRZA YULIANTO, ST, MT
NIP. 19740707 200312 1 004

KEPALA SEKSI LALU LINTAS (IV.A)
ARLIM ARIF
NIP. 19660621 199003 1 006

SEKSI PERENCANAAN PRASARANA (IV.A)
MARTELENA, SH
NIP. 19640405 198908 2 001

KEPALA SEKSI PEMADUAN MODA DAN TEKNOLOGI PERHUBUNGAN (IV.A)
YHOHANA RIZA, SH, M.Si
NIP. 19650808 199303 2 006

KEPALA SEKSI ANGKUTAN (IV.A)
EDDY RICARDO, SH
NIP. 19690514 200604 1 003

SEKSI PEMBANGUNAN PRASARANA (IV.A)
HERRY SUSILO, ST
NIP. 19751001 200501 1 011

KEPALA SEKSI LINGKUNGAN PERHUBUNGAN (IV.A)
DANOFRIN
NIP. 19621107 198503 1 005

KEPALA SEKSI PENGUJIAN SARANA (IV.A)
YUHERMAN, SH
NIP. 19670316 198803 1 003

KEPALA SEKSI PENGOPERASIAN PRASARANA (IV.A)
AGUSTAR, SP
NIP. 19630925 198711 1 001

KEPALA SEKSI KESELAMATAN (IV.A)
ERMAN JUSA, SH
NIP. 19730301 199403 1 003

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

1.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan organisasi dibutuhkan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan (sarana dan prasarana). Keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas dari sumber daya yang ada. Untuk mencapai keberhasilan sebagaimana diharapkan tentunya dibutuhkan dukungan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya peralatan (sarana dan prasarana) yang memadai baik dalam segi kualitas maupun kuantitasnya.

Pada tahun 2019 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan didukung oleh 45 (empat puluh lima) personil. Komposisi jumlah SDM dari jenjang pendidikan dapat dilihat dalam tabel dan grafik dibawah ini:

Tabel 1.1
Komposisi SDM Dinas Perhubungan
Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	0	-
2	SLTP	0	-
3	SLTA/SMK	19	42,22 %
4	D2	0	-
5	D3	1	2,22 %
6	D4	0	-
7	S1	19	42,22 %
8	S2	6	13,34 %
Jumlah		45	

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan 2019

Sedangkan komposisi jumlah SDM dari pangkat golongan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. 2
Komposisi SDM Dinas Perhubungan
Menurut Pangkat Golongan

No	Pangkat Golongan	Jumlah	Prosentase
1	Golongan I	0	-
2	Golongan II	16	35,56%
3	Golongan III	24	53,33%
4	Golongan IV	5	11,11%
Jumlah		45	

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan 2019

Untuk komposisi jumlah SDM dari jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. 3
Komposisi SDM Dinas Perhubungan
Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki Laki	41	91,11%
2	Perempuan	4	8,89%
Jumlah		45	

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan 2019

1.3 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan barang tidak bergerak dan bergerak serta barang perlengkapan lainnya, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1. 4
Sarana Prasarana Dinas Perhubungan
Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Harga (Rp.)
1	Tanah	1	Bidang	394.467.844,-
2	Peralatan dan Mesin	1.539	Unit	11.832.173.123,-
3	Gedung dan Bangunan	32	Unit	2.750.820.496,-
4	Jalan. Irigasi dan Jaringan	85	Buah	11.096.682.064,-
5	Aset Tetap lainnya	-	-	-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-
7	Aset lainnya	1	Unit	34.650.000,-
	Jumlah	1.658		26.108.793.527,-

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan 2019

1.4 Isu Strategis dan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Yang Sedang Dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

Adapun isu – isu strategis dinas yang berkaitan dengan permasalahan tugas dan fungsi dinas Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

1. Terbatasnya tenaga teknis bidang perhubungan;
2. Masih beroperasinya moda transportasi yang tidak layak;
3. Masih banyak daerah yang belum terlayani trayek angkutan;
4. Masih minimnya fasilitas keselamatan lalu lintas;
5. Kurangnya sarana dan prasarana perhubungan;

6. Masih banyaknya daerah rawan kecelakaan;
7. Masih belum optimalnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
8. Masih adanya kondisi jalan yang rusak

B. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana transportasi;
2. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib dan disiplin dalam berlalu lintas.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai instansi/ dinas yang disertai tanggung jawab dan kewenangan menyelenggarakan urusan wajib Pemerintah Daerah di bidang perhubungan telah menyusun Perencanaan Strategis pembangunan di bidang perhubungan tahun 2016 - 2021.

Penyusunan rencana strategis Dinas Perhubungan Tahun 2016 - 2021 (selanjutnya disebut Renstra) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021.

Renstra Dinas Perhubungan memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan 2016 - 2021. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan sejak tahun 2016 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi dapat juga diartikan sebagai pernyataan tentang

tujuan operasional organisasi dalam mencapai visi, diwujudkan dalam produk rencana aksi dan pelayanan sehingga dapat mengikuti irama perubahan jaman pihak – pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Misi ini akan dipergunakan sebagai landasan tujuan utama ke arah mana perencanaan / program ingin dicapai.

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dan harus selaras dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan. Penetapan tujuan itu sendiri hendaknya didasarkan kepada faktor – faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan misi. Adapun **Visi dan Misi Kepala Daerah** dapat dilihat sebagai berikut :

a. Visi

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera”

b. Misi

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang.

Tugas Dinas Perhubungan berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah berada pada **Misi II** yang berbunyi **“Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah”**. Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Misi II Kepala Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

No	MISI	TUJUAN	SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perekonomian dan Infrastruktur Sosial Yang Terkait dengan Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal
			Meningkatnya Kesadaran Tertib Berlalu Lintas

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan ditetapkannya perjanjian kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja SKPD Dinas Perhubungan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transporatasi	80
2	Meningkatnya Kesadaran Tertib Berlalu Lintas	Persentase Menurunnya Pelanggaran Berlalu Lintas	5%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Hasil Penilaian AKIP Dinas Perhubungan Oleh INSpektorat	BB

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

Indikator	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas	223	265	220	200	180	160

Sasaran Strategis Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Formulasi	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi	Jumlah Kuisisioner Yang Dibagikan - Jumlah Responden Yang Menyatakan Tidak Puas	70	73	75	80	85	90	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Prasarana, Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya Kesadaran Tertib Berlalu Lintas	Persentase Menurunnya Pelanggaran Berlalu Lintas	(Jumlah Pelanggaran Tahun Lalu - Jumlah Pelanggaran Tahun Ini) / Jumlah Pelanggaran Tahun Lalu (X 100)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Dinas Perhubungan

2.4 Rencana Anggaran

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan, memerlukan anggaran dalam pelaksanaan operasionalnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 09 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Direvisi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 04 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2019, anggaran belanja mencakup belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung yang ada berupa belanja pegawai, Tunjangan, Iuran Asuransi, Tambahan Penghasilan PNS dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban kerja serta Insentif Pemungutan retribusi. Sedangkan untuk belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.

Pada tahun 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan mendapat belanja baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung sejumlah Rp. 17.053.227.147,- Belanja tahun 2019 ini pada perjalanan penggunaannya terjadi perubahan untuk penyesuaian dan penyelesaian program dan kegiatan yang telah direncanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Pada Tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.3
Uraian Belanja Langsung dan Tidak Langsung
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019

NO	URAIAN	JUMLAH	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	Belanja	17.053.227.147,-	17.546.987.285,-
1	Belanja Tidak Langsung	3.976.453.758,-	4.181.675.325,-
	Belanja Pegawai	3.976.453.758,-	4.181.675.325,-
2	Belanja Langsung	13.076.773.389,-	13.365.311.960,-
	Belanja Pegawai		

		529.400.000,-	623.350.000,-
	Belanja Barang & Jasa	8.833.781.760,-	9.339.680.460,-
	Belanja Modal	3.713.591.629,-	3.402.281.500,-
	JUMLAH	17.053.227.147,-	17.546.987.285,-

Belanja Dinas Perhubungan Tahun 2019 setelah perubahan adalah sebesar RP. 17.546.987.285,-. Bila dibandingkan dengan jumlah belanja sebelum perubahan adalah sebesar Rp. 17.053.227.147,- maka terjadi penambahan belanja sebesar Rp. 493.760.138,- atau terjadi penambahan sebesar 3%.

Belanja tidak langsung digunakan untuk gaji pegawai sedangkan belanja langsung digunakan untuk pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 13.365.311.960,- (Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4
Ikhtisar Anggaran Belanja Langsung
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Ket
A	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	945.782,960,-	
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.400.000,-	
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	167.900.000,-	
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	45.057.000,-	
4.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	23.000.000,-	
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	84.007.819,-	
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.441.131,-	
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	18.188.310,-	
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.455.500,-	
9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	11.500.000,-	

	undangan		
10.	Penyediaan Makanan dan Minuman	48.095.600,-	
11.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	50.575.000,-	
12.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	129.275.000,-	
13.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	13.000.000,-	
14.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS	26.000.000,-	
15.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	79.887.600,-	
B	PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	518.282.500,-	
16.	Pembangunan Gedung Kantor	Efisiensi/ Pangkas	
17.	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	104.250.000,-	
18.	Pengadaan Meubelair	Efisiensi/ Pangkas	
19.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	60.200.000,-	
20.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	353.832.500,-	
C	PROG. PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	-	
21.	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	Efisiensi/ Pangkas	
D	PROG. PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	983.669.700,-	
22.	Pembangunan Fasilitas Transportasi (Penunjang DAK)	26.269.700,-	
23.	Pembangunan Fasilitas Transportasi (DAK)	957.400.000,-	
E	PROG. REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	50.716.000,-	
24.	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalu Lintas	49.966.000,-	
25.	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pos Retribusi (TPR)	750.000,- Efisiensi/ Pangkas	
F	PROG. PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	957.095.300,-	
26.	Penunjang Kegiatan WTN	34.770.000,-	
27.	Pengawasan dan Pengendalian LLAJ	201.415.000,-	
28.	Operasional Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Laut	120.137.000,-	

29.	Pembinaan dan Penertiban Lalu Lintas Angkutan Laut	62.214.000,-	
30.	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas	42.461.000,-	
31.	Pemilihan Sopir Teladan (Abiyasa)	29.273.700,-	
32.	Operasional Transportasi Pelayanan Pendidikan	298.835.000,-	
33.	Pelayanan Terminal dan Perparkiran	167.989.600,-	
G	PROG. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	715.258.000,-	
34.	Pengembangan Pembangunan Pelabuhan	715.258.000,-	
H.	PROG. PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	8.406.489.000,-	
35.	Pembangunan Penerangan Jalan Umum	2.824.860.000,-	
36.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Penerangan Jalan Umum	5.211.269.000,-	
37.	Pengadaan Rambu-rambu RPPJ	73.710.600,-	
38.	Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan Lalu Lintas	296.649.400,-	
I	PROG. PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	333.496.000,-	
39.	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	333.496.000,-	
J	PROG. PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI	-	
40.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Efisiensi/ Pangkas	
K	PROG. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	454.522.500,-	
41.	Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	454.522.500,-	
	JUMLAH	13.365.311.960,-	

Adapun rencana anggaran untuk masing-masing sasaran akan terlihat sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Rencana Anggaran Masing-masing Sasaran
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Anggaran
Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	983.669.700,-
			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	466.824.600,-
			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	715.258.000,-
	Meningkatnya Kesadaran Tertib Berlalu Lintas	Persentase Menurunnya Pelanggaran Berlalu Lintas	Program peningkatan Pelayanan Angkutan	490.270.700,-
			Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	8.406.489.000,-
			Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	333.496.000,-
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	50.716.000,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

A. Capaian Kinerja

Adapun capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi	Angka	80	87	109%
2.	Persentase Menurunnya Pelanggaran Berlalu Lintas	%	5	4,46%	89,20%
Rata-rata Capaian					99,10%

Dari tabel 3.1 di atas dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis sebesar 99,10%. Pencapaian sasaran strategis termasuk Sangat Berhasil dengan predikat Sangat Baik.

B. Analisa Capaian Kinerja Per Sasaran

1. Capaian Kinerja Per Sasaran
 - a. Capaian Kinerja Sasaran 1

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran 1
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi	Angka	80	87	109%

Dalam pencapaian indikator 1 dari sasaran strategis telah menampilkan hasil yang sangat baik, dengan capaian kinerja mencapai 109%. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi merupakan data/informasi tentang pengukuran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Dinas Perhubungan terhadap pelayanan transportasi. Pengukuran dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 100 orang sampel dan diharapkan 80 orang masyarakat memberikan pernyataan puas terhadap Pelayanan Transportasi. Setelah dilakukan penyebaran kuesioner, diperoleh hasil sebanyak 87 orang menyatakan puas terhadap pelayanan transportasi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Capaian Kinerja Sasaran 2

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran 2
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Menurunnya Pelanggaran Berlalu Lintas	%	5	4,46%	89,20%

Dalam pencapaian indikator 2 dari sasaran strategis telah menampilkan hasil yang sangat baik, dengan capaian kinerja mencapai 89,20%. Pada tahun 2018 jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi sebanyak 3966 kasus, sementara pada tahun 2019 jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi sebanyak 3789 kasus, ini berarti terjadi penurunan angka kecelakaan sebanyak 177 kasus (menurun sebesar 4,46%).

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2018			2019		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi	Angka	75	78	108%	75	81	109%

Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2018			2019		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Menurunnya Pelanggaran Berlalu Lintas	%	Menurun 5	Meningkat 1,74%	Meningkat 1,74%	Menurun 5	Menurun 4,46	89,20%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2018 capaian kinerja sasaran 2 tidak dapat tercapai, karena target yang telah ditetapkan untuk menurunkan angka pelanggaran berlalu lintas justru terjadi peningkatan sebesar 1,74%. Dan untuk Tahun 2019 capaian kinerja sasaran 2 yang ditargetkan menurunkan angka pelanggaran berlalu lintas sebesar 5%, dapat terealisasi sebesar 4,46% dengan persentase capaian sebesar 89,20%.

Adapun untuk capaian indikator tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan masih belum bisa dicapai. Indikator tujuan yang ditetapkan adalah menurunkan/menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Capaian Kinerja
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Angka	200	350

Pada tahun 2019 terjadi 350 kasus jumlah kecelakaan lalu lintas sedangkan pada tahun 2018 terjadi 298 kasus kecelakaan, ini berarti terjadi kenaikan sebanyak 52 kasus kecelakaan lalu lintas (Meningkat 17%) dari tahun sebelumnya. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa target pada Tahun 2019 yaitu penurunan angka kecelakaan di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 5% tidak dapat tercapai, karena masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Ini berarti dari target yang telah ditetapkan menurunkan angka kecelakaan sebesar 5% tidak dapat terealisasi karena justru terjadi kenaikan angka kecelakaan sebesar 17%. Dari tabel di bawah ini dapat dilihat data perkembangan capaian indikator tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2016 :

Indikator	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	Tahun 2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas	223	223	265	265	220	298	200	350	180	160

Berikut beberapa foto kecelakaan yang terjadi pada Tahun 2019 :



Kecelakaan di Bukit Pulai – Kec. Batang kapas



Kecelakaan di Bukit Pulai – Kec. Batang kapas



Kecelakaan di Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan

Adapun permasalahan yang dihadapi sehingga menyebabkan tidak tercapainya target kinerja antara lain :

1. Masih kurangnya tanggung rasa antar sesama pengguna jalan dan perilaku masyarakat pengguna jalan yang masih sering mengabaikan keselamatan diri sendiri maupun orang lain seperti mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk, sambil menggunakan HP dan ugal-ugalan di jalan.
2. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat pengguna jalan akan pentingnya tertib dan disiplin dalam berlalu lintas. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu.

3. Masih minimnya fasilitas keselamatan lalu lintas seperti rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, Zoss, pagar pengaman jalan dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas (LPJU) yang terpasang.
4. Kondisi kendaraan yang kurang memenuhi syarat laik jalan karena kurangnya perawatan.
5. Kondisi jalan yang rusak juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan.

Solusi yang dapat dilaksanakan antara lain :

1. Mengadakan pembinaan/sosialisasi/penyuluhan untuk memberikan pemahaman akan pentingnya keselamatan lalu lintas.
2. Perlu dilakukannya pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan di titik-titik rawan kecelakaan.
3. Pemenuhan fasilitas keselamatan lalu lintas.
4. Perbaiki kondisi jalan yang rusak.

Strategi/upaya ke depan yang ditempuh untuk dapat meningkatkan capaian indikator ini ditahun berikutnya antara lain :

1. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan serta pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana lalu lintas.
2. Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan tertib lalu lintas kepada masyarakat melalui berbagai media antara lain :
 - Penyuluhan langsung.
 - Pemasangan spanduk keselamatan berlalu lintas, poster, stiker
 - Menginformasikan melalui website.
 - Siaran radio.
3. Melaksanakan pembinaan melalui kegiatan pemeriksaan kendaraan di jalan bekerja sama dengan Polres Pesisir Selatan.
4. Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu, marka, APILL, Zoss, guardrail) dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas (LPJU).

5. Koordinasi dengan Dinas PU untuk pelaksanaan perbaikan jalan.

Dalam menekan angka kecelakaan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan telah berusaha semaksimal mungkin melakukan beberapa upaya dalam mengatasi dan mengurangi terjadinya kecelakaan, seperti pengawasan dan pengendalian lalu lintas diantaranya dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Melakukan pengamanan dan pengaturan persimpangan pada jam sibuk pagi hari.
- 2) Melakukan pengamanan keramaian pada kegiatan daerah, baik itu yang sifatnya lokal maupun nasional.
- 3) Melakukan pengamanan dan pengaturan keramaian masyarakat dan lalu lintas di pasar pasar.
- 4) Melakukan pengamanan perparkiran pada kawasan wisata.
- 5) Melakukan Patroli dan Pengaturan di Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan sepanjang Jalan Kabupaten.
- 6) Melakukan kegiatan Pengamanan dan Pengaturan Jalan saat terjadinya bencana baik banjir, longsor dan lainnya serta saat terjadinya kecelakaan Lalu Lintas.
- 7) Melaksanakan Pengawasan rutin terhadap Angkutan Barang dan Orang di kawasan Terminal.
- 8) Melaksanakan kegiatan pengamanan dan pengawasan saat Hari Raya Keagamaan dan Hari Besar Nasional lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, ada beberapa hambatan/ kesulitan yang dihadapi selama pelaksanaan tugas :

- 1) Minimnya peralatan dalam penugasan di lapangan terutama saat malam hari seperti tidak tersedianya perlengkapan lapangan seperti jaket hujan.
- 2) Terbatasnya kendaraan patroli untuk digunakan sebagai operasional lapangan dimana saat ini baru tersedia sebanyak 2 unit dengan jangkauan yang terbatas.

- 3) Belum disiplinnya para pemilik dan pengguna kendaraan saat memarkirkan kendaraan di badan dan bahu jalan serta sering melanggar larangan.
- 4) Belum disiplinnya para pedagang dalam menjajakan dagangan mereka hingga ke badan jalan terutama di pasar pasar tingkat Kecamatan.

Berikut dokumentasi dari beberapa kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan :



3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran untuk masing-masing sasaran dapat dilihat sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Untuk Masing-Masing Sasaran
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2019	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi	80	87	109%	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	983.669.700	922.729.330	93.80
					Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	466.824.600	447.319.750	95.82
					Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	715.258.000	713.959.000	99.82
Meningkatnya Kesadaran Tertib Berlalu Lintas	Persentase Menurunnya Pelanggaran Berlalu Lintas	5%	4.46%	89.20 %	Program peningkatan Pelayanan Angkutan	490.270.700	474.964.663	96.88
					Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	8.406.489.000	8.299.084.716	98.72
					Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	333.496.000	333.194.641	99.91
					Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	50.716.000	49.264.000	97.14
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Hasil Penilaian AKIP Dinas Perhubungan Oleh Inspektorat	BB	BB	100%	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	945.782.960	915.265.853	96.77
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	518.282.500	495.632.364	95.63
					Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	454.522.500	453.658.750	99.81

TOTAL	13.365.311.960	13.105.073.067	98,05
-------	----------------	----------------	-------

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung tercapainya indikator ini adalah sebesar Rp. 13.365.311.960,- (Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 13.105.073.067,- (Tiga Belas Milyar Seratus Lima Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah), dengan persentase realisasi sebesar 98,05%.

Adapun ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan tahun anggaran 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.4
Ikhtisar Realisasi Keuangan
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019

No	Program/ Kegiatan	Belanja Langsung		
		Anggaran	Realisasi	%
A	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	945.782,960,-	915.265.853,-	96,77
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.400.000,-	104.691.041,-	89,94
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	167.900.000,-	167.650.000,-	99,85
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	45.057.000,-	45.057.000	100,00
4.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	23.000.000,-	14.650.000,-	63,70
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	84.007.819,-	84.007.738,-	100,00
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.441.131,-	38.813.431,-	91,45
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	18.188.310,-	18.188.310,-	100,00
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.455.500,-	90.455.500,-	100,00
9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.500.000,-	7.000.000,-	60,87
10.	Penyediaan Makanan dan Minuman	48.095.600,-	46.526.000,-	96,74
11.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	50.575.000,-	50.562.233	99,97

12.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	129.275.000,-	129,170.000,-	99,92
13.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	13.000.000,-	13.000.000,-	100,00
14.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS	26.000.000,-	26.000.000,-	100,00
15.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	79.887.600,-	79,494,600,-	99,51
B	PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	518.282.500,-	495.632.364,-	95,63
16.	Pembangunan Gedung Kantor	Efisiensi/ Pangkas		
17.	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	104.250.000,-	100.970.020,-	96,85
18.	Pengadaan Meubelair	Efisiensi/ Pangkas		
19.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	60.200.000,-	55.522.000,-	92,23
20.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	353.832.500,-	339.140.344,-	95,85
C	PROG. PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	-	-	-
21.	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	Efisiensi/ Pangkas		
D	PROG. PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	983.669.700,-	922.729.330,-	93,80
22.	Pembangunan Fasilitas Transportasi (Penunjang DAK)	26.269.700,-	26.269.700,-	100,00
23.	Pembangunan Fasilitas Transportasi (DAK)	957.400.000,-	896.459.630,-	93,63
E	PROG. REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	50.716.000,-	49.264.000,-	97,14
24.	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalu Lintas	49.966.000,-	48.514.000,-	97,09
25.	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pos Retribusi (TPR)	750.000,-	750.000,-	100,00
		Efisiensi/ Pangkas		
F	PROG. PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	957.095.300,-	922.284.413,-	96,36
26.	Penunjang Kegiatan WTN	34.770.000,-	30.040.000,-	86,40

27.	Pengawasan dan Pengendalian LLAJ	201.415.000,-	196.084.389,-	97,35
28.	Operasional Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Laut	120.137.000,-	116.101.300,-	96,64
29.	Pembinaan dan Penertiban Lalu Lintas Angkutan Laut	62.214.000,-	61.472.862,-	98,81
30.	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas	42.461.000,-	42.123.412,-	99,20
31.	Pemilihan Sopir Teladan (Abiyasa)	29.273.700,-	29.142.700,-	99,55
32.	Operasional Transportasi Pelayanan Pendidikan	298.835.000,-	286.762.850,-	95,96
33.	Pelayanan Terminal dan Perparkiran	167.989.600,-	160.556.900,-	95,58
G	PROG. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	715.258.000,-	713.959.000,-	99,82
34.	Pengembangan Pembangunan Pelabuhan	715.258.000,-	713.959.000,-	99,82
H.	PROG. PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	8.406.489.000,-	8.299.084.716,-	98,72
35.	Pembangunan Penerangan Jalan Umum	2.824.860.000,-	2.790.211.630,-	98,77
36.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Penerangan Jalan Umum	5.211.269.000,-	5.141.775.886,-	98,67
37.	Pengadaan Rambu-rambu RPPJ	73.710.600,-	73.180.100,-	99,28
38.	Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan Lalu Lintas	296.649.400,-	293.917.100,-	99,08
I	PROG. PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	333.496.000,-	333.194.641,-	99,91
39.	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	333.496.000,-	333.194.641,-	99,91
J	PROG. PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI	-	-	-
40.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Efisiensi/ Pangkas		
K	PROG. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	454.522.500,-	453.658.750,-	99,81
41.	Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	454.522.500,-	453.658.750,-	99,81
	JUMLAH	13.365.311.960,-	13,105.073.067,-	98,05

BAB IV PENUTUP

Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis sektor perhubungan berusaha untuk memaksimalkan sumber daya yang ada baik itu sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun anggaran yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan serta berusaha untuk memanfaatkan sumber daya tersebut dengan efektif dan efisien. Meskipun demikian Dinas Perhubungan berusaha untuk bertanggungjawab mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja dan analisis diperoleh gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yang pada umumnya kondusif dan berjalan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di dalam perjalanan pelaksanaan tujuan kedinasan pada tahun 2019 tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi sejak terbentuknya Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan baik yang datang dari lingkungan internal maupun eksternal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dilakukan langkah-langkah dan upaya pemecahan masalah secara cermat, partisipatif, dengan menempuh berbagai cara yang disesuaikan menurut urgensi dan prioritas masalah di lapangan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dibuat dalam rangka pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta hasil-hasil yang dicapai.

Painan, 10 Februari 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESIR SELATAN



GUNAWAN, S.Sos, M.Si

NIP. 196007041991011002

1. Faktor Keberhasilan

Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis sektor perhubungan berusaha untuk memaksimalkan sumber daya yang ada baik itu sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun anggaran yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan serta berusaha untuk memanfaatkan sumber daya tersebut dengan efektif dan efisien. Meskipun demikian Dinas Perhubungan berusaha untuk bertanggungjawab mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Berdasarkan evaluasi kinerja dan analisis diperoleh gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yang pada umumnya kondusif dan berjalan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dilihat dari manajemen daerah, sebagai salah satu perwujudan otonomi daerah telah menunjukkan peningkatan kemampuan yang cukup berarti, salah satunya dengan melibatkan seluruh komponen baik pemerintah maupun peran swasta dan masyarakat insan perhubungan baik dalam perencanaan partisipatif maupun dari sisi pengisian pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian sasaran tujuan otonomi daerah secara khusus dan tujuan negara pada umumnya. Proses pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 secara keseluruhan dapat berjalan lancar serta menunjukkan keberhasilan yang berarti, tercermin dari :

- 1) Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas.
- 2) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi.
- 3) Tersedianya Fasilitas lalu lintas seperti, adanya penambahan pengadaan rambu-rambu, RPPJ, Warning Light dan LPJU.
- 4) Tersedianya sepeda motor patroli sebanyak 2 unit yang digunakan untuk operasional pengawasan dan pengendalian lalu lintas.

2. Permasalahan dan Kendala

Di dalam perjalanan pelaksanaan tujuan kedinasan pada tahun 2019 tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi sejak terbentuknya Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan baik yang datang dari lingkungan internal maupun eksternal. Untuk mengatasi permasalahan

tersebut diperlukan langkah-langkah dan upaya pemecahan masalah yang dilakukan secara cermat, partisipatif, dengan menempuh berbagai cara disesuaikan menurut urgensi dan prioritas masalah di lapangan. Beberapa permasalahan yang dihadapi beserta upaya yang dilakukan dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Permasalahan	Solusi
1. Terbatasnya tenaga teknis di bidang transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian Perhubungan maupun lembaga teknis terkait setiap tahunnya. 2. Memberdayakan pegawai dengan kemampuan teknis untuk memberikan pembekalan kepada petugas operasional/lapangan mengenai ketugasan di bidang transportasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan dinas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang telah ada. 2. Berusaha untuk melakukan perencanaan anggaran untuk menambah sarana dan prasara sesuai kebutuhan.
3. Sarana dan prasarana lalu lintas yang belum memadai.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan prasarana yang telah ada dengan melakukan perawatan yang intensif agar prasarana lalu lintas dapat berfungsi dengan baik 2. Melakukan pengawasan dan pengendalian prasarana lalu lintas di setiap jam sibuk pagi di lokasi rawan kecelakaan. 3. Melakukan kajian kebutuhan prasarana lalu lintas untuk perencanaan manajemen rekayasa. 4. Melakukan perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya baik ditingkat APBD, APBD Prov dan APBN.

<p>4. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dalam berlalu lintas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan sosialisasi untuk awak angkutan, warga masyarakat serta anak sekolah dengan berbagai media secara rutin seperti : <ol style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi secara langsung untuk awak angkutan dan anak sekolah. b. Pemasangan Spanduk, Poster, Stiker c. Menginformasikan melalui website d. Siaran radio 2. Melakukan pemeriksaan insidentil yang dilaksanakan oleh PPNS Perhubungan yang dilaksanakan secara periodik untuk angkutan barang dan angkutan umum.
---	--

Padang, 10 Februari 2020
 Kepala Dinas Perhubungan
 KABUPATEN PESISIR SELATAN



GUNAWAN, S.Sos, M.Si
 NIP. 1971041991011002

DAFTAR PRESTASI BUPATI PESIR SELATAN TAHUN 2019

No.	Perangkat Daerah	Nama Prestasi	Lokasi, Tanggal dan Tahun perolehan	Asal prestasi	Foto	Keterangan
1.	Dinas Perhubungan	Sertifikat Wahana Tata Nugraha	Jakarta, 15 September 2019	Menteri Perhubungan	Terlampir	Keberhasilan Dalam Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Sistem Transportasi Perkotaan Tahun 2019
2.	Dinas Perhubungan	The Best Content Creator	Jakarta, 11 Oktober 2019	Menteri Perhubungan	Terlampir	Juara Terfavorit Dalam Menciptakan Alat Keselamatan Lalu Lintas

Painan, 23 Desember 2019
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN PESIR SELATAN

GUNAWAN, S.Sos, M.Si
 NIP. 197002041991011002



MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT WAHANA TATA NUGRAHA

Diberikan Penghargaan Kepada :

*Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Provinsi Sumatera Barat*

Atas

Keberhasilan Mengikuti Penilaian Kinerja Penyelenggaraan
Sistem Transportasi Perkotaan Tahun 2019

Jakarta, 15 September 2019

MENTERI PERHUBUNGAN

BUDI KARYA SUMADI



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR : 551.2 / 01 / DISHUB-SB / VIII / 2019

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : SASKIA PUTRI SUKMANA
ASAL : SMAN 3 PAINAN

SEBAGAI :

JUARA 1

**PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LLAJ TINGKAT
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019**

**BERTEMPAT DI edOTEL SMKN 9 PADANG
PADANG, 25 - 28 AGUSTUS 2019**





DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT



SERTIFIKAT

NOMOR : 551.2 / **14** / DISHUB-SB / VIII / 2019

DIBERIKAN KEPADA

SASKIA PUTRI SUKMANA

SEBAGAI PESERTA

**PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT**

BERTEMPAT DI edOTEL SMKN 9 PADANG
PADANG, 25-28 AGUSTUS 2019

KETUA PELAKSANA

ERA OKTAWADY, SE

NIP. 19661003 199103 1 004

Safety

Sayangi Nyawa

KurangiKecepatan

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT



HERI NOFIARDI, SE, MM

NIP. 19621119 198611 1 001